



JURNAL PERTAHANAN

Identitas • Nasionalisme • Integritas

KEAMANAN MARITIM

“Membangun Kerjasama Maritim untuk Keamanan dan Stabilitas”

**Membangun *Maritime Domain Awareness*
guna Mendukung Keamanan Maritim
dalam Perspektif TNI Angkatan Laut**

**Pengelolaan Batas Maritim dan Kawasan Perbatasan:
Menentukan Batas Negara guna Meningkatkan Pengawasan,
Penegakan Hukum dan Kedaulatan NKRI**

Strategi Laut Biru dalam Penanganan Keamanan Maritim

Kolaborasi Keamanan Maritim dalam Menjaga Stabilitas Nasional

**Konsep Keamanan Indo-Pasifik:
Bentuk dan Hambatannya**

**Keamanan Maritim Laut Cina Selatan :
Tantangan dan Harapan**

SUSUNAN DEWAN REDAKSI

Mitra Bestari :

Prof. Achmad Fedyani Saifuddin, M.A., Ph.D.
Prof. Dr. Susanto Zuhdi, M.Hum.

Dewan Redaksi :

Letjen TNI Ir. Drs. Subekti, M.Sc., M.P.A.
Marsda TNI Djoko Setiono, S.A.P., M.M.

Pemimpin Redaksi :

Laksma TNI Dr. Dadang S. Wirasuta, S.E., S.Sos., S.Pi., S.H., M.M., M.B.A.

Sekretaris Redaksi :

Kolonel Laut (KH/W) Dra. Christine Sri Marnani, M.A.P.
Kolonel Inf Drs. Hary Agus Sunarto
Letkol Czi G. Eko Sunarto, S.P.D., M.Si.
Penata Tk I-IV/b Dra. Meiwana Sinisuka, M.M.

Redaksi Pelaksana :

Kolonel Inf Robinhud, S.I.P., M.M.
Kolonel Laut (T) Dohar Sianturi, S.T., M.B.A.
Kolonel Caj Muh. Kasim

Editor :

Penata Tk I-III/d Indriana Kartini, S.I.P., M.A.
Kolonel Kes IDK. Kertawidana, S.K.M., M.K.K.K.
Letkol Inf Joni Widjayanto, S.Sos.

Distributor :

Penata Tk I-III/d Mochamad Halim, S.E., M.Si.
Serma Hasan Basri Purba

Alamat Redaksi

Universitas Pertahanan Indonesia (UNHAN)
Jl. Salemba Raya No. 14 Jakarta Pusat 10430
Telp. (021) 3927459 Fax. (021) 3924335
E-mail: unhan@unhan.go.id

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
MEMBANGUN MARITIME DOMAIN AWARENESS GUNA MENDUKUNG KEAMANAN MARITIM DALAM PERSPEKTIF TNI ANGKATAN LAUT Marsetio	1-16
PENGELOLAAN BATAS MARITIM DAN KAWASAN PERBATASAN: MENENTUKAN BATAS NEGARA GUNA MENINGKATKAN PENGAWASAN, PENEGAKKAN HUKUM DAN KEDAULATAN NKRI Hasjim Djalal	17-40
STRATEGI LAUT BIRU DALAM PENANGANAN KEAMANAN MARITIM Sapto J. Poerwodagdo	41-52
KOLABORASI KEAMANAN MARITIM DALAM MENJAGA STABILITAS NASIONAL Bambang Suwarto	53-66
DEGROWTH DAN VISI WORLD-CLASS NAVY Daniel Mohammad Rosyid dan Mas Roro Lilik Ekowanti	67-78
KEAMANAN MARITIM LAUT CINA SELATAN : TANTANGAN DAN HARAPAN Dadang Sobar Wirasuta	79-104
ANTARA NETRALITAS DAN KEPENTINGAN NASIONAL INDONESIA DI LAUT CINA SELATAN: PERSPEKTIF GEOPOLITIK A.Yani Antariksa	105-120
TINJAUAN TEORITIS PROYEKSI KEPENTINGAN STRATEGIS CINA, AMERIKA SERIKAT, DAN NEGARA-NEGARA ASIA TENGGARA DALAM SENGKETA LAUT CINA SELATAN Denik Iswardani W	121-132
KONSEP KEAMANAN INDO-PASIFIK: BENTUK DAN HAMBATANNYA Syaiful Anwar	133-150
PENYELUNDUPAN MANUSIA DAN ANCAMAN KEAMANAN MARITIM INDONESIA Agus Subagyo dan Dadang Sobar Wirasuta	151-166
PETUNJUK PENULISAN JURNAL	v
UCAPAN TERIMA KASIH	viii

KATA PENGANTAR

Salam jumpa,

Waktu cepat berlalu, tak terasa Jurnal Pertahanan edisi Desember 2013 Volume 3 Nomor 3 kembali menyapa Anda dengan tulisan-tulisan cerdasnya demi membangun kecintaan Anda terhadap bumi pertiwi. Pada edisi kali ini, Redaksi akan mengangkat tema yang identik dengan Jurnal Pertahanan yang lalu, yakni Keamanan Maritim. Dua edisi Jurnal ini Redaksi persembahkan dalam rangka menyambut diselenggarakannya *Jakarta International Defense Dialogue (JIDD)* yang bertema *National Security* pada bulan Maret 2014.

Sir Walter Raleigh, seorang penulis masyhur, penyair, dan juga penjelajah berkebangsaan Inggris yang berperan merintis jalan bagi kolonisasi Britania Raya di Amerika Utara pada akhir abad ke-16 mengatakan “*For whoever commands the sea commands the trade; whoever commands the trade of the world commands the riches of the world, and consequently the world itself*”, Barangsiapa menguasai lautan, akan menguasai perdagangan, barangsiapa menguasai perdagangan, berarti menguasai kekayaan dunia, sehingga pada akhirnya akan menguasai dunia. Menurut Raleigh, negara yang menguasai lautanlah yang pada akhirnya akan menguasai dunia.

Indonesia, sebagai negara kepulauan yang terbesar di dunia, yang delapan puluh persen luas wilayahnya terdiri atas lautan, bila kekuatan lautnya kuat, maka akan berpeluang menjadi negara maritim yang besar, yang memiliki pengaruh bagi dunia. Geografis Indonesia yang terletak pada posisi lalu lintas perdagangan dunia, membuat perairan Indonesia sangat penting bagi dunia, karena menjadi *Sea Lanes of Communication (SLOC)* serta *Sea Lines of Oil Trade (SLOT)* tempat lalu lintas. Oleh sebab itu, Indonesia perlu meningkatkan pertahanan lautnya sehingga impian menjadi Negara Maritim yang kuat dapat diwujudkan.

Terkait dengan tema tersebut di atas, maka Jurnal Pertahanan menampilkan tema Keamanan Maritim sebagai tanggung jawab Universitas Pertahanan meningkatkan pemahaman bela negara kepada masyarakat Indonesia.

Selamat membaca.

Redaksi

TINJAUAN TEORITIS PROYEKSI KEPENTINGAN STRATEGIS CINA, AMERIKA SERIKAT, DAN NEGARA-NEGARA ASIA TENGGARA DALAM SENGKETA LAUT CINA SELATAN

THEORETICAL OVERVIEW OF CHINA, UNITED STATES OF AMERICA, AND SOUTHEAST ASIA COUNTRIES' STRATEGIC INTEREST PROJECTION IN SOUTH CHINA SEA CONFLICT.

Denik Iswardani W¹

Universitas Budi Luhur
(denik.iswardani@budiluhur.ac.id)

Abstrak – artikel ini berupaya untuk menganalisa tinjauan teoritis mengenai kepentingan strategis Cina, AS, dan negara-negara Asia Tenggara dalam konflik Laut Cina Selatan. Studi ini dilakukan dengan memproyeksikan kepentingan nasional negara-negara tersebut di Laut Cina Selatan dan menganalisisnya secara teoritis dengan menggunakan teori *Balance of Influence Theory and Hedging Strategy*. Tujuan dari studi ini untuk menganalisa strategi negara-negara Asia Tenggara dan negara ekstra regional (Cina dan AS) untuk saling menahan diri secara konstruktif dan terikat dalam kerja sama di kawasan dan mempromosikan aturan dan norma dalam perjanjian dan prinsip-prinsip yang dapat membantu mereka meraih kepentingan nasional mereka dan mengabaikan hegemoni di Laut Cina Selatan.

Kata kunci : kepentingan strategis, sengketa Laut Cina Selatan, Cina, AS, Asia Tenggara

Abstract - This article attempts to analyze the theoretical overview of China, United States of America, and Southeast Asia countries strategic interest in South China Sea conflict. This study is carried by projecting their national interest in South China Sea and analyzed them theoretically by using *Balance of Influence Theory and Hedging Strategy*. The purpose of this study was to analyze the strategy of Southeast Asian countries and extra regional powers (China and US) used to keep each other constructively and cooperatively engaged in the region and to promote rule and norm-based arrangements and principles that help them to achieve their national interest and deny intramural hegemony in South China Sea.

Keywords : strategic interest, South China Sea dispute, China, US, Southeast Asia

Pendahuluan

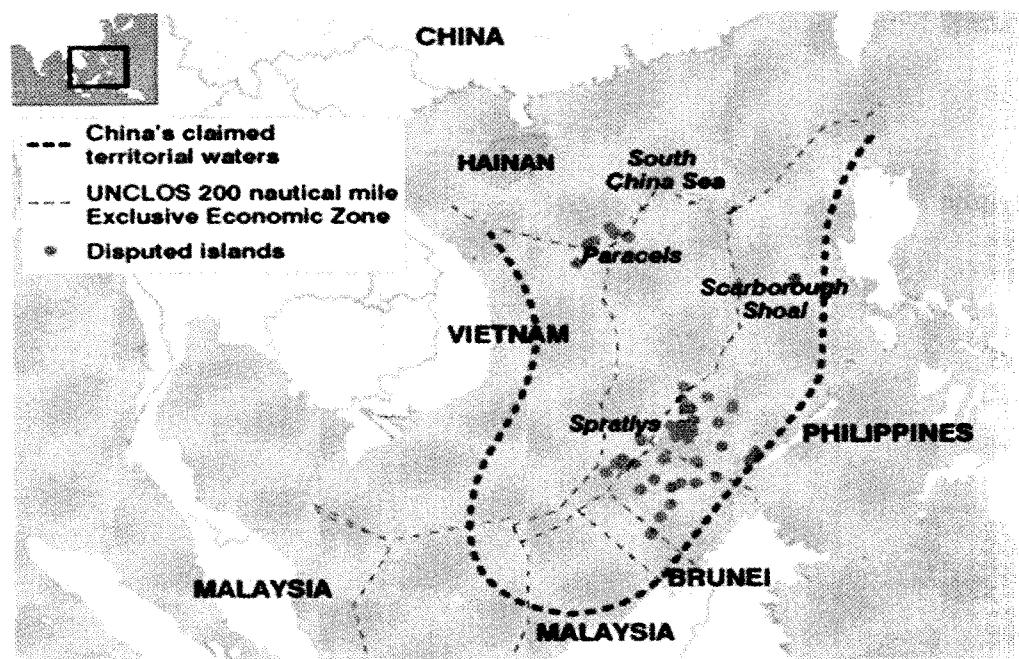
Laut Cina Selatan merupakan kawasan laut yang terletak di kawasan Samudra Pasifik terbentang dari Singapura dan Selat Malaka di barat daya hingga Selat Taiwan di timur

¹ Denik Iswardani Witarti, Ph.D merupakan staf pengajar Hubungan Internasional di FISIP Universitas Budi Luhur. Memperoleh gelar doktoral dari Pengkajian Strategi dan Keamanan, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). Penelitian yang dilakukan berkaitan dengan isu-isu keamanan terutama tentang peredaran senjata api, isu-isu non-tradisional, dan resolusi konflik.

laut. Kawasan ini meliputi lebih dari 200 pulau kecil, bebatuan, dan karang yang sebagian besar berada di rangkaian kepulauan Paracel dan Spratly. Rangkaian kepulauan inilah yang seringkali diperebutkan sehingga menimbulkan ketegangan politik dari beberapa negara di sekitarnya. Laut Cina Selatan pada dasarnya merupakan *no man's island* karena kawasan ini pada dasarnya tidak dimiliki oleh siapapun melainkan digunakan sebagai jalur perdagangan internasional. Berdasarkan Konvensi PBB dalam Hukum Laut (UNCLOS) yang telah diadopsi pada tahun 1982, setiap negara berhak untuk memasukkan wilayah hingga 12 mil laut sebagai bagian dari kedaulatannya dan 200 mil laut untuk Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE).

Namun, salah satu pasal lain dalam UNCLOS yang berbunyi bahwa kawasan bebatuan yang tidak dapat menopang habitat manusia atau kehidupan ekonominya sendiri maka tidak memiliki zona eksklusif atau batas kontinen, seringkali menjadi alasan dari negara-negara yang melakukan klaim sepihak atas kepulauan Spratly atau wilayah Laut Cina Selatan untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi. Adapun negara-negara yang seringkali terlibat dalam sengketa karena klaim sepihak adalah Brunei, Filipina, Malaysia, Taiwan, Vietnam, dan Cina.²

Gambar 1. Peta South China Sea Claim



Sumber: <http://www.globalsecurity.org/military/world/war/images/south-Cina-sea-claims3-2F>

² J.P. Rowan, "The U.S.-Japan Security Alliance, ASEAN, and the South China Sea Dispute", *Asian Survey*, 45, No.3, 2005, hlm. 419.

Laut Cina Selatan merupakan jalur pengiriman barang lewat laut tersibuk kedua di dunia. Setiap tahunnya, lebih dari setengah lalu lintas supertanker dunia melalui jalur Selat Malaka, Sunda, dan Lombok menuju ke Cina, Jepang, Taiwan, dan Korea Selatan. Selain itu, kawasan ini memiliki potensi cadangan minyak dalam jumlah besar. Cadangan minyak telah ditemukan di banyak batas kontinen di sekitar kawasan ini. Hingga saat ini, diperkirakan bahwa kawasan ini mengandung cadangan minyak sebanyak 17,7 Milyar ton, lebih banyak dari Kuwait (13 Milyar ton) yang merupakan negara keempat yang memiliki sumber minyak paling banyak di dunia.³

Fokus perhatian utama Laut Cina Selatan adalah sumber daya hidrokarbon, khususnya minyak. Perkiraan cadangan minyak tersebut bervariasi. Menurut estimasi Survei Geologi Amerika Serikat (USGS) 60% - 70% hidrokarbon di kawasan Laut Cina Selatan merupakan gas alam.⁴ US Geological Survey memperkirakan jumlah total cadangan dan sumber daya yang belum ditemukan ditemukan di cekungan lepas pantai dari Laut Cina Selatan adalah 28 miliar barel. Kenyataan bahwa daerah sekitarnya kaya akan deposit minyak telah menyebabkan spekulasi bahwa Kepulauan Spratly bisa menjadi provinsi bantalan minyak yang belum dimanfaatkan. Ada sedikit bukti di luar klaim Cina untuk mendukung pandangan bahwa wilayah itu mengandung sumber daya minyak yang substansial.

Gas alam dapat menjadi sumber daya hidrokarbon yang paling melimpah di Laut Cina Selatan. Sebagian besar ladang gas hidrokarbon dieksplorasi di daerah sekitar Brunei, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam. Perkiraan oleh US Geological Survey menunjukkan bahwa sekitar 60 sampai 70 persen dari sumber hidrokarbon daerah adalah gas alam. Seperti dengan minyak, perkiraan sumber daya gas alam Laut Cina Selatan bervariasi. Salah satu perkiraan Cina untuk seluruh cadangan gas alam Laut Cina Selatan adalah 2 kuadriliun kaki kubik. Laporan lain Cina perkiraan 193 miliar barel per hari setara minyak hanya untuk di Kepulauan Spratly saja.⁵ Dibandingkan dengan kawasan lain,

³ Kol. Karmin Suharna, "Konflik dan Solusi Laut Cina Selatan dan Dampaknya Bagi Ketahanan Nasional". Majalah Tannas, Edisi 94, 2012, hlm. 35.

⁴ Athansius Aditya Nugraha, "Manuver Politik Cina dalam Konflik Laut Cina Selatan," *Jurnal Pertahanan*, Edisi III, 2011, hlm. 55-63.

⁵ U.S. Department of Energy, "China-Analysis, U.S. Energy Information Administration (EIA)," Country Analysis Briefs, dalam <http://www.eia.gov/countries/cab.cfm?fips=CH>, diunduh pada 18 November 2013.

sumber daya Laut Cina Selatan memang terbilang belum menggungguli, namun klaim yang mengikutsertakan Cina menjadikan kawasan ini berpotensi strategis dalam stabilitas keamanan kawasan Asia Pasifik. Selain itu, jalur Laut Cina Selatan pun merupakan satu jalur transportasi utama minyak dunia. Sehingga kepemilikannya pun menciptakan peningkatan posisi bargaining tersendiri.⁶

Balance of Influence

Konsep *Balance of Influence* merupakan bentuk evolusi dari konsep *Balance of Power* (Morgenthau, 1920) dan *Balance of Threat* (Stephen M. Walt, 1987). Robert Ross menyebutkan Konsep *Balance of Power* secara universal mengabaikan variabel interdependensi ekonomi dalam sistem global dan hanya berfokus pada basis kekuatan militer.⁷ Begitu pula dengan konsep *Balance of Threat* yang mempunyai kecenderungan untuk melakukan *balancing* secara konfrontatif dengan ancaman-ancaman yang muncul (*threat*). Kedua konsep ini tidak menyediakan alternatif untuk melakukan kerja sama kooperatif dengan negara-negara yang dianggap sebagai *challenger* maupun *ancaman* (*threat*). Padahal dengan semakin kompleksnya konstelasi kepentingan aktor-aktor dalam tatanan global saat ini, dibutuhkan konsep yang lebih kooperatif dalam menganalisis perilaku sebuah negara untuk mencapai kepentingannya. Oleh karena itu Evelyn Goh menyediakan alternatif baru dalam menganalisis perilaku negara-negara tersebut, yang tidak lain adalah konsep *Balance of Influence* yang diwujudkan dengan strategi *hedging*.

Goh mendefinisikan *hedging* sebagai satu paket strategi yang bertujuan untuk menghindari (atau direncanakan sebagai suatu hal yang kebetulan) sebuah situasi ancaman dimana terdapat *clash interest and ideology* antara negara hegemon dan *challenger* di suatu tatanan internasional dan negara-negara di luar kedua kategori tersebut tidak dapat memutuskan untuk melakukan alternatif *balancing*, *bandwagoning* atau bersikap netral. Sebaliknya negara di luar kedua kategori tersebut memilih berada di tengah-tengah

⁶ The Military Balance, Chapter Six: Asia, Military Modernisation Continues, (London: Routledge, 2013), hlm. 245.

⁷ Robert S. Ross, "Balance of Power Politics and the Rise of China: Accommodation and Balancing in East Asia", *Security Studies*, Vol. 15, No. 3, 2006.

dengan melakukan kerja sama yang menguntungkan dengan keduanya atau menghindari untuk memilih berada di salah satu sisi (negara *balancer* atau *hegemon*).

Hal ini seperti ditegaskan Goh dalam tulisannya yang berjudul *Understanding 'Hedging' in Asia-Pacific Security*, menjelaskan strategi *hedging* sebagai:

*"a set of strategies aimed at avoiding (or planning for contingencies in) a situation in which states cannot decide upon more straightforward alternatives such as balancing, bandwagoning, or neutrality. Instead they cultivates a middle position that forestalls or avoids having to choose one side [or one straightforward policy stance] at the obvious expense of another"*⁸

Dalam konteks kawasan Asia Tenggara, Goh menyatakan terdapat negara-negara yang dikategorikan sebagai negara *hegemon* dan negara *lead-balancer*. Goh mengklasifikasikan Cina sebagai negara *hegemon* di kawasan Asia Tenggara melihat agresivitas pertumbuhan dan sifatnya yang ekspansif di kawasan tersebut, baik dalam bidang pertumbuhan akuisisi ekonomi maupun modernisasi militer. Dalam hal ini Amerika Serikat muncul sebagai *lead balancer* demi menandingi pertumbuhan dan status quo Cina di kawasan tersebut.⁹

Strategi *hedging* ini penulis gunakan untuk menganalisis strategi negara-negara Asia Tenggara dalam menyikapi munculnya negara *hegemon* dan *balancer* di kawasan tersebut. Terdapat kekhawatiran akan terjadinya ketidakstabilan sistem multipolar di kawasan tersebut oleh negara-negara kecil dan menengah dikarenakan adanya persaingan kepentingan antara negara *hegemon* dan *balancer* di dalam kawasan Asia Tenggara. Oleh karena itu negara-negara kecil di kawasan Asia Tenggara menggunakan strategi *hedging* sebab tidak memungkinkan untuk menggunakan strategi *balancing* dan *bandwagoning* secara murni dengan negara-negara kuat.¹⁰

⁸ Evelyn Goh, "Understanding 'hedging' in Asia-Pacific Security", Working paper yang diajukan pada *Pacific Forum CSIS*, Honolulu, Hawai, 31 Agustus. 2006, hlm. 1.

⁹ Evelyn Goh, *Meeting the China Challenge: The U.S. in Southeast Asia Regional Security Strategies*, (Washington: East West Center Publications, 2005), hlm. 2-3.

¹⁰ Evelyn Goh, "Great Powers and Powers and Hierarchical Order in Southeast Asia", *International Security Journal*, Vol 32, No. 3, 2007, hlm. 121.

Menurut Goh, ada tiga bentuk elemen dalam strategi hedging yang harus diimplementasikan di kawasan Asia Tenggara oleh negara-negara kecil dan menengah di dalamnya, yaitu *indirect balancing (soft balancing)*, *complex engagement*, dan *enmeshing a number of regional powers*.¹¹ *Indirect Balancing* merupakan kebijakan yang diciptakan untuk menghadapi kemampuan negara hegemon dengan menjalin hubungan baik dengan negara *balancer*-nya, dapat dilakukan melalui *non-spesific deterrence*, yaitu penguatan pertahanan, maupun membangun hubungan diplomatik, dan politik dengan negara *balancer* yang dapat menjadi pendukung negara ketika hubungan dengan negara hegemon menjadi buruk.¹² *Indirect balancing* ini dapat diimplementasikan oleh negara-negara Asia Tenggara dengan membujuk Amerika Serikat untuk berpartisipasi sebagai observer dalam sengketa Laut Cina Selatan untuk meng-counter kekuatan Cina yang terlibat dalam permasalahan keamanan tersebut.

Complex engagement (keterlibatan kompleks) merupakan pendekatan terhadap negara hegemon (Cina). Pada tingkat politik, keamanan, dan strategi dengan harapan pemimpin Cina dapat dipengaruhi atau disosialisasikan untuk mematuhi peraturan dan norma-norma yang berlaku di kawasan Asia Tenggara, khususnya norma-norma yang mengandung unsur *preventive diplomacy*. Dalam hal ini, kebijakan *engagement* dapat dipahami sebagai sebuah *constructive hedge* yang meredam agresivitas dominasi potensial Cina namun tetap menguntungkan negara-negara Asia Tenggara.¹³

Elemen yang terakhir merupakan *enmeshing a number of regional powers*, dimana hedging merupakan sebuah kebijakan umum akan mengumpulkan (*enmeshing*) kekuatan besar di regional dalam rangka mendirikan sebuah stabilitas tatanan regional. Asia Tenggara melakukan hedging terhadap hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu dominasi hegemoni Cina, penarikan diri Amerika Serikat dari kawasan ini dan ketidakstabilitan tatanan di kawasan. Dalam hal ini, negara-negara Asia Tenggara mengumpulkan mitra-partner sebanyak-banyaknya (Korea Selatan, Jepang, Kanada, Australia, Selandia Baru, dan India) dalam sengketa Laut Cina Selatan sebagai observer dalam penyelesaian masalah tersebut.

¹¹ Evelyn Goh, 2005, op.cit., hlm. 3-4.

¹² Evelyn Goh, 2006, op.cit., hlm. 2.

¹³ Johnston dan Ross, 1999, dalam Kong dalam Evelyn Goh, 2005, op.cit., hlm. 3.

Kepentingan Strategis Cina dan Amerika Serikat dalam Sengketa Laut Cina Selatan

Sejak dulu Cina merupakan negara yang paling sensitif terhadap isu kedaulatan. Pengalaman Cina yang wilayahnya mengalami *foreign encroachment* membuat negara ini gigih dalam mempertahankan persatuan nasional dan integritas wilayahnya. Oleh karena itu, para pemimpin Cina bertekad untuk mempertahankan wilayah yang dianggap menjadi wilayah kedaulatan Cina. Dalam hal ini, kepemilikan atas pulau Spratly menjadi penting untuk memperkuat posisi politis Cina terhadap wilayah Tibet dan Xianjiang. Cina telah menetapkan bahwa Laut Cina Selatan merupakan “*core national interest*”. Hal ini dinyatakan oleh Dai Bingguo, Wakil Menteri Luar Negeri Cina akhir Juli 2009 lalu.

*“the PRC’s first core interest is maintaining its fundamental system and state security, second is state sovereignty and territorial security, and the third is the continued stable development of the economy and society... in specific terms, Tibet, Xianjiang, Taiwan and South China Sea island as well”*¹⁴

Lalu, Cina melalui Menteri luar negerinya Yang Jiechi menunjukkan ketidaknyamanannya dengan mengatakan bahwa penyelesaian persengketaan harus dilakukan pihak-pihak yang bersangkutan tanpa intervensi luar. Selain itu, kebutuhan Cina akan suatu armada angkatan laut yang kuat dan pangkalan-pangkalan strategis merupakan prasyarat yang penting. Dalam hal ini, ketegasan sikap Cina dalam mempertahankan klaimnya atas wilayah Laut Cina Selatan juga berkaitan dengan niat Cina untuk memperoleh status sebagai kekuatan maritim yang handal.

Sedangkan AS berkepentingan pada keamanan di jalur Laut Cina Selatan mengingat jalur tersebut merupakan jalur lalu lintas perdagangan AS. Lebih lanjut, Hillary Clinton Menteri Luar Negeri AS menyatakan:

“The United States, like every nation, has a national interest in freedom of navigation, open access to Asia’s maritime commons and respect for international law in the South China Sea”.¹⁵

¹⁴ Meirisa Hilda Sukasa, “Perkembangan Militer Cina di Laut Cina Selatan: Kajian Peran Diplomasi Indonesia”, (Jakarta: Pusat Pelatihan dan Pendidikan Kementerian Luar Negeri RI, 2010), hlm. 231.

¹⁵ Meirisa Hilda Sukasa, *Ibid*, hlm. 233.

Bagi AS, Laut Cina Selatan merupakan satu jalur dari enam rute alternatif ~~bagi~~ timur AS yang menghubungkan pantai baratnya dengan Teluk Persia. Laut Cina ~~Se~~ merupakan bagian dari sistem pertahanan globalnya karena merupakan jalur ~~pe~~ bagi armada-armada AS dalam melaksanakan kepentingan strategisnya. ~~Ber~~ Perang Dingin, pada batas-batas tertentu telah membawa perubahan Kebijakan ~~Ke~~ Negeri AS di kawasan Asia Tenggara. AS telah menutup pangkalan Angkatan Laut ~~Angk~~ Subic Bay dan pangkalan udara di Clark yang disebabkan oleh beberapa faktor antara ~~nya~~ tidak tercapainya persetujuan mengenai sewa di antara kedua negara. Perlu ~~men~~ pangkalan militer di Filipina menunjukkan bahwa kehadiran AS secara fisik di ~~di~~ Tenggara telah berkurang.

Implementasi Balance of Influence (Hedging Strategy) dalam Sengketa Laut Cina Selatan

Sebuah survei dan penilaian Amerika Serikat menyebutkan bahwa lingkungan strategis dan hubungan pertahanan di Asia mungkin mendapat pergeseran penting ~~yang~~ penggunaannya dalam dinamika geopolitik Asia.¹⁶ Pergeseran tersebut sebagian besar dipengaruhi oleh kebangkitan Cina di kawasan Asia Pasifik, baik dalam ruang lingkup ekonomi maupun militer. Dalam perubahan strategis di kawasan Asia Pasifik, ~~terutama~~ Tenggara khususnya, Cina menunjukkan sikap lebih fleksibel. Cina menjadi aktif dalam pengembangan regionalisme keamanan. Sikap ini membuat Cina lebih diterima di kawasan dan mempunyai posisi lebih kuat dalam persaingannya dengan kekuatan lain di kawasan. Oleh karena itu, jalan terbaik bagi Amerika Serikat dan negara lain di kawasan Asia Pasifik adalah mengembangkan pendekatan-pendekatan multilateral untuk mencegah dominasi Cina di kawasan. Hal ini diimplementasikan dengan konsolidasi internal untuk memperkuat posisi dalam perkembangan baru di kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur.¹⁷

Hal pertama yang dilakukan dalam strategi hedging negara-negara Asia Tenggara adalah *indirect balancing* (*soft balancing*), yaitu saling melibatkan negara besar lainnya (antara Amerika Serikat dan Cina) dengan cara persuasif untuk bertindak sebagaimana

¹⁶ Evelyn Goh, "Hierarchy and the Role of the United States in the East Asian Security Order", *International Relations of the Asia-Pacific*, Vol. 8, No.3, 2008, hlm. 368.

¹⁷ Edy Prasetyono, "China dan Regionalisme Asia Tenggara", *Analisis CSIS*, Vol. 37, No.1, 2008, hlm.104.

counterweight dalam penyeimbangan kekuatan di kawasan sehingga tidak muncul negara hegemon absolut. Negara-negara Asia Tenggara pada kenyataannya melakukan strategi *hedging* dalam ARF (ASEAN Regional Forum) untuk menghindari 3 ancaman yang ada di wilayah Asia Tenggara: hegemoni atau dominasi Cina; penarikan kerja sama Amerika Serikat dengan dan tatanan regional tidak stabil.

ARF merupakan forum dialog resmi antar pemerintah dengan sasaran utama membangun rasa saling percaya di antara negara-negara anggota (*Confidence Building Measure/ CBM*), diplomasi preventif (*preventive diplomacy*), dan penyelesaian konflik (*conflict resolution*). Bahasan yang dicakup oleh ARF sangat luas, tidak terbatas pada masalah keamanan di Asia Tenggara saja melainkan juga di Asia Pasifik. ARF bukan merupakan forum untuk memecahkan masalah keamanan regional di Asia Pasifik, melainkan forum dialog untuk mendiskusikan dan mempertemukan pandangan yang beragam, sehingga terbentuk rasa saling percaya dan kepentingan bersama tentang isu keamanan regional di Asia Pasifik, khususnya mengenai penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan.¹⁸ Dalam forum ARF, negara-negara Asia Tenggara mampu membatasi aktivitas kekuatan-kekuatan luar kawasan dan mengambil tindakan kolektif untuk mencegah dominasi kekuasaan besar di Asia Tenggara. Tindakan tersebut dapat dikatakan dengan strategi *hedging* yang diwujudkan dengan *enmeshing*.

Usaha negara-negara ASEAN dalam menjaga eksistensi militer AS di wilayah Asia Tenggara sangat diperlukan untuk menyeimbangkan agresivitas Cina. Dalam implementasinya, Malaysia dan Singapura terus melakukan latihan militer dengan Inggris, Australia, dan Selandia Baru dalam kerja sama *Five Power Defense Arrangements (FPDA)*. Demikian juga dengan Thailand yang terus menggelar latihan militer tahunan dengan Amerika Serikat, yang dikenal sebagai "Cobra Gold." Sejak tahun 1995, angkatan laut AS telah berpartisipasi dalam serangkaian latihan kerja sama bilateral tahunan dengan Brunei, Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapore, dan Filipina dalam *Cooperation Afloat Readiness and Training (CARAT)*.¹⁹

¹⁸ F. Andrea, "Peran Keamanan ASEAN Regional Forum", dalam Bantarto Bandoro (Ed.), *Agenda dan Penataan Keamanan Di Asia Pasifik*, (Jakarta: Centre for Strategic and International Studies, 1996), hlm. 75.

¹⁹ Allan Collins, *Security and Southeast Asia: Domestic, Regional, and Global Issues*, (Singapore: Lynne Rienner Publisher, 2003), hlm. 177.

Demikian pula dengan negara *lead-balancer* (Amerika Serikat) dan negara hegemon (Cina), mereka melakukan strategi hedging demi meng-counter kekuatan satu sama lain. Kehadiran AS dalam ARF sangat intens karena kepentingan strategis militer dan ekonomi nya di kawasan Asia Pasifik dan Asia Tenggara. Pada pertemuan ARF ke-18 tahun 2011 di Bali, Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton menyebutkan bahwa Amerika Serikat adalah pihak yang berkepentingan di jalur laut Laut Cina Selatan, rute yang mengangkut hampir setengah dari perdagangan global dan sangat penting untuk transportasi kemiliteran Amerika Serikat.²⁰ Kedatangan Presiden Barack Obama pada ARF ke-18 di Bali juga membuktikan bahwa AS tidak akan membiarkan Cina berdiri sendiri dalam posisi dominan di Asia, terutama dalam tumpang tindih klaim di Laut Cina Selatan.

Dalam ARF, Cina menerapkan sejumlah kebijakan yang mengundang simpati dari negara-negara Asia Tenggara. Demi mematuhi salah satu asas dalam ARF yaitu transparansi militer (*Confidence building measure/ CBM*) yang di agendakan pada forum dialog ke-3 pada tahun 1996 di Jakarta, Cina mulai menerbitkan Buku Putih pertahanannya (*Defence White Paper*) pada tahun 1998. Buku putih tersebut berisi laporan lengkap tentang penilaian Cina terhadap situasi keamanan global, doktrin-doktrin pertahanan, kebijakan pertahanan nasional, pengeluaran pertahanan, modernisasi dan penyebarluasan kekuatan bersenjata, langkah-langkah pembangunan militer dan sebagainya. Hingga saat ini, *Defence White Paper* terbaru dirilis pada Maret 2011.²¹ Hal ini dilakukan untuk membangun kepercayaan antara anggota ARF terhadap Cina demi menghilangkan image agresivitas dan ofensivitas Cina. Sehingga Cina terhindar dari situasi *security dilemma* yang terjadi ketika mengembangkan angkatan militernya, terutama dalam kebijakan *Blue Navy* Water. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Cina melakukan strategi hedging dalam bentuk *complex engagement* dengan negara-negara Asia Tenggara.

Pada ARF ke-5 dalam *Intersessional Support Group (ISG)* disebutkan bahwa ARF membuka kemungkinan yang besar terhadap dialog bilateral dan *informal workshop*.²² Hal

²⁰ Ernest Z. Bower, Lie Nathanael Santoso, “18th ASEAN Regional Forum”, dalam <http://csis.org/publication/18th-asean-regional-forum-bali-indonesia> , diunduh pada 15 November 2013.

²¹ “ASEAN Regional Forum Document Series”, ASEAN Regional Forum Security Outlook, Volume XII, 2011. (Jakarta: ASEAN Secretariat), hlm. 37.

²² “ASEAN Regional Forum Document Series, The Fifth ASEAN Regional Forum”, (Jakarta: ASEAN Secretariat, 1997).

ini memudahkan Cina karena mekanisme penyelesaian secara bilateral dengan menghadapi negara-negara pengklaim lain secara individual, kemungkinan Cina untuk menang semakin besar. Hal ini dicerminkan dalam kegusaran Cina pada saat Menlu AS Hillary Clinton menyatakan bahwa “kebebasan navigasi di Laut Cina Selatan” merupakan kepentingan Amerika Serikat.²³

Kesimpulan

Dalam sengketa Laut Cina Selatan, strategi *hedging* digunakan oleh negara-negara di kawasan sebagai suatu cara untuk menyatukan (*engaging*) Cina dan Amerika Serikat agar tercipta hubungan yang baik diantara keduanya sehingga negara-negara regional dapat terhindar dari situasi anarki yang biasanya terjadi antara negara *balancer* dan *hegemon*. Negara *balancer* (Amerika Serikat) dan *hegemon* (Cina) juga melakukan strategi *hedging* untuk secara kooperatif terlibat satu sama lain sehingga mereka masih dalam tatanan global yang damai, karena tidak memungkinkan untuk melakukan *balance of power* secara ekstrim di wilayah ini.

Strategi *hedging* diwujudkan dengan keterlibatan negara-negara yang bersengketa di Laut Cina Selatan dalam ARF (ASEAN Regional Forum), yaitu sebuah forum yang menjadi titik *convenient* bagi kotak-kotak diplomatik negara-negara besar di Asia Pasifik dengan catatan regional power dalam ARF dapat mempertahankan perimbangan yang stabil (*stable balance*) antara kekuatan-kekuatan besar di dalamnya. Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa strategi *hedging* yang diambil oleh Amerika Serikat, Cina, dan negara-negara Asia Tenggara merupakan strategi yang rasional untuk diterapkan mengingat intensitas ketegangan yang terjadi di wilayah Laut Cina Selatan.

²³ Hillary Clinton, “Remarks at 17th ASEAN Regional Forum”, dalam <http://www.state.gov/secretary/rm/2010/07/145095.htm>, 2010, diunduh pada 10 November 2013.

Daftar Pustaka

Buku

- Andrea, F. 1996. "Peran Keamanan ASEAN Regional Forum", dalam Bantarto Bandoro (Ed.), *Agenda dan Penataan Keamanan di Asia Pasifik*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies.
- Collins, Allan. 2003. *Security and Southeast Asia: Domestic, Regional, and Global Issues*. Singapore: Lynne Rienner Publisher.
- Goh, Evelyn. 2005. *Meeting the China Challenge: The U.S. in Southeast Asia Regional Security Strategies*. Washington: East West Center Publications.
- Rowan, J.P. 2005. "The U.S.-Japan Security Alliance, ASEAN, and the South China Sea Dispute". *Asian Survey*. Vol. 45. No.3.
- Sukasa, Meirisa Hilda. 2010. *Perkembangan Militer Cina di Laut Cina Selatan: Kajian Peran Diplomasi Indonesia*. Jakarta: Pusat Pelatihan dan Pendidikan Kementerian Luar Negeri RI.
- The Military Balance, Chapter Six: Asia, Military Modernisation Continues*. 2013. London: Routledge.

Jurnal

- Ross, Robert S. 2006. "Balance of Power Politics and the Rise of China: Accommodation and Balancing in East Asia". *Security Studies*. Vol. 15. No. 3.
- Nugraha, Athansius Aditya. 2011. "Manuver Politik Cina dalam Konflik Laut Cina Selatan," *Jurnal Pertahanan*. Edisi III.
- Goh, Evelyn. 2008. "Hierarchy and the Role of the United States in the East Asian Security Order", *International Relations of the Asia-Pacific*. Vol. 8, No.3.
- , 2007. "Great Powers and Powers and Hierarchical Order in Southeast Asia", *International Security Journal*. Vol 32. No. 3.
- , 2006. "Understanding 'hedging' in Asia-Pacific Security". Working paper yang diajukan pada Pacific Forum CSIS. Honolulu, Hawai. 31 Agustus.
- Prasetyono, Edy. 2008. "China dan Regionalisme Asia Tenggara". *Analisis CSIS*. Vol. 37. No.1.
- Suharna, Kol. Karmin. 2012. "Konflik dan Solusi Laut Cina Selatan dan Dampaknya Bagi Ketahanan Nasional". *Tannas*. Edisi 94.

Website

- "ASEAN Regional Forum Document Series". 2011. *ASEAN Regional Forum Security Outlook, Volume XII*. Jakarta: ASEAN Secretariat.
- "ASEAN Regional Forum Document Series. 1997. The Fifth ASEAN Regional Forum". Jakarta: ASEAN Secretariat.
- Bower, Ernest Z. & Lie Nathanael Santoso. "18th ASEAN Regional Forum", dalam <http://csis.org/publication/18th-asean-regional-forum-bali-indonesia>, diunduh pada 15 November 2013.
- Clinton, Hillary. "Remarks at 17th ASEAN Regional Forum", dalam <http://www.state.gov/secretary/rm/2010/07/145095.htm>, 2010, diunduh pada 10 November 2013.
- U.S. Department of Energy, "China-Analysis, U.S. Energy Information Administration (EIA)," *Country Analysis Briefs*, dalam <http://www.eia.gov/countries/cab.cfm?fips=CH>, diunduh pada 18 November 2013.